Research and Development Journal Of Education
Vol. 12, No. 2, Oktober 2026, Pp: 985 – 992
DOI: https://doi.org/10.30998
Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE

p–ISSN 2406-9744
e–ISSN 2657-1056

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN BERDASARKAN MODEL GEORGE C. EDWARDS III DI KECAMATAN MUARA BULIAN

Wirna[1(*)], Erna Budiarti[2], Candra Apriyansyah[3], Rabiatul Adawiyah[4], Rosliana Mindaryati[5]
Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia[1-5]
wirna.nofwendri@gmail.com[1], bbbudiarti@gmail.com[2], chandraapriyansyah1@gmail.com[3], arrahman31.raraadawiyah@gmail.com[4], mindaryatirosliana@gmail.com[5]

Received: 26 Oktober 2026
Revised: 27 Oktober 2026
Accepted: 28 Oktober 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kecamatan Muara Bulian melalui model implementasi kebijakan publik George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan rekomendasi strategis penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal tertanam (embedded single-case study). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif moderat, dan studi dokumentasi yang melibatkan informan dari tingkat penentu kebijakan (Dinas Pendidikan, Bunda PAUD), pengawas/supervisi (Korwil, Pengawas SD), satuan pendidikan pelaksana (2 TK dan 4 SD), serta kelompok sasaran orang tua murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi kebijakan berjalan efektif melalui jalur birokrasi dan sosiokultural dengan pemahaman yang seragam terhadap peniadaan tes calistung dan pelaksanaan MPLS 6 hari kerja sesuai Permendikdasmen No. 12 Tahun 2026, meski masih menghadapi tantangan disonansi ekspektasi orang tua; (2) Sumber daya didukung oleh program Beasiswa S1 PAUD, penambahan sarpras, dan media lokal 'Sikulup', namun terdapat ketidaksesuaian beban instruksi teks bacaan pada buku paket kelas 1 SD; (3) Disposisi pelaksana menunjukkan kepatuhan 100% peniadaan tes calistung saat PPDB dan komitmen guru dalam menerapkan pembelajaran adaptif fondasi dasar; (4) Struktur birokrasi telah ditopang oleh SOP supervisi dan program RUPAMU 4 Sisi, namun koordinasi lintas jenjang PAUD-SD belum terlembagakan secara formal serta format pelaporan MPLS masih bersifat administratif-visual. Penelitian merekomendasikan perlunya penyusunan Juknis daerah terpadu, pelembagaan forum komunikasi dan MoU gugus PAUD-SD, optimalisasi kelas pengasuhan (parenting), serta sinkronisasi bahan ajar berjenjang di kelas awal SD.

Keywords: Implementasi Kebijakan; Model George C. Edwards III; Transisi PAUD ke SD; Menyenangkan

(*) Corresponding Author: Wrina, wirna.nofwendri@gmail.com

How to Cite: Wrina, W., Budiarti, E., Apriyansyah, C., Adawiyah, R., & Mindaryati, R. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN BERDASARKAN MODEL GEORGE C. EDWARDS III DI KECAMATAN MUARA BULIAN. *Research and Development Journal of Education*, 12(2), 985-992.

INTRODUCTION

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi pembangunan manusia, dan fondasi tersebut perlu dilanjutkan secara konsisten ketika anak memasuki Sekolah Dasar

(SD). Perpindahan dari PAUD ke SD tidak semata-mata perubahan jenjang administratif, tetapi proses perkembangan yang menuntut kesinambungan pengalaman belajar, dukungan emosional, dan penyesuaian terhadap lingkungan sekolah yang baru (Dockett & Perry, 2014; OECD, 2017). Kesiapan sekolah pun bersifat menyeluruh, mencakup kematangan sosial-emosional, kemampuan berkomunikasi, kemandirian, dan keterampilan motorik, tidak terbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Transisi yang terlalu berorientasi pada tuntutan akademik berpotensi menimbulkan kecemasan dan kesenjangan pengalaman belajar antara PAUD dan kelas awal SD (Apostolou, 2022; Mardiani et al., 2024).

Pemerintah merespons persoalan ini melalui Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, dengan tiga perubahan utama: penerimaan peserta didik baru tanpa tes calistung, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai masa adaptasi dan asesmen awal, serta pembelajaran kelas awal yang bertahap, kontekstual, dan menyenangkan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Namun, keberhasilan kebijakan tidak otomatis terjadi setelah regulasi diterbitkan. Kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan melalui penyampaian informasi, penyediaan sumber daya, pembentukan sikap pelaksana, dan pengaturan tata kerja birokrasi, sehingga jarak antara tujuan kebijakan dan praktik dapat muncul pada setiap tahap tersebut.

Data awal di Kecamatan Muara Bulian menunjukkan jarak tersebut. Dari 40 SD yang menjadi tujuan lulusan PAUD/TK, 25 SD (62,5%) terindikasi masih menerima atau mempertahankan praktik yang menjadikan calistung sebagai tuntutan kesiapan anak. Pelaksanaan MPLS bervariasi, sebagian masih menekankan pengenalan lingkungan dan kegiatan administratif. Supervisi akademik dan manajerial telah berjalan secara berkala, tetapi pelaporan masih berupa dokumentasi foto dan video yang belum menggambarkan perkembangan atau hasil asesmen awal anak. Sebagian orang tua juga masih memandang calistung sebagai indikator utama keberhasilan anak sehingga memperkuat tekanan pada anak dan guru. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak semata-mata terletak pada kepatuhan sekolah terhadap regulasi.

Kompleksitas tersebut dapat dibaca melalui model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang memuat empat variabel saling memengaruhi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Model ini relevan karena implementasi kebijakan transisi melibatkan banyak aktor, yaitu dinas pendidikan, pengawas, penilik, kepala satuan pendidikan, guru PAUD dan kelas I SD, serta orang tua, yang memerlukan pemahaman tujuan yang sama, kecukupan sumber daya, kesediaan mengubah praktik lama, dan pembagian tugas yang jelas.

Kajian terdahulu umumnya menyoroti kesiapan anak, pembelajaran menyenangkan, pelaksanaan MPLS, penghapusan tes calistung, atau kolaborasi guru PAUD dan SD. Kajian tersebut penting bagi substansi transisi, tetapi belum banyak menguraikan proses implementasi kebijakan secara utuh melalui keempat variabel Edwards III pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kecamatan Muara Bulian berdasarkan model George C. Edwards III, meliputi kekuatan dan kelemahan implementasi, keterkaitan antarvariabel, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi penguatan yang sesuai dengan kondisi lokal.

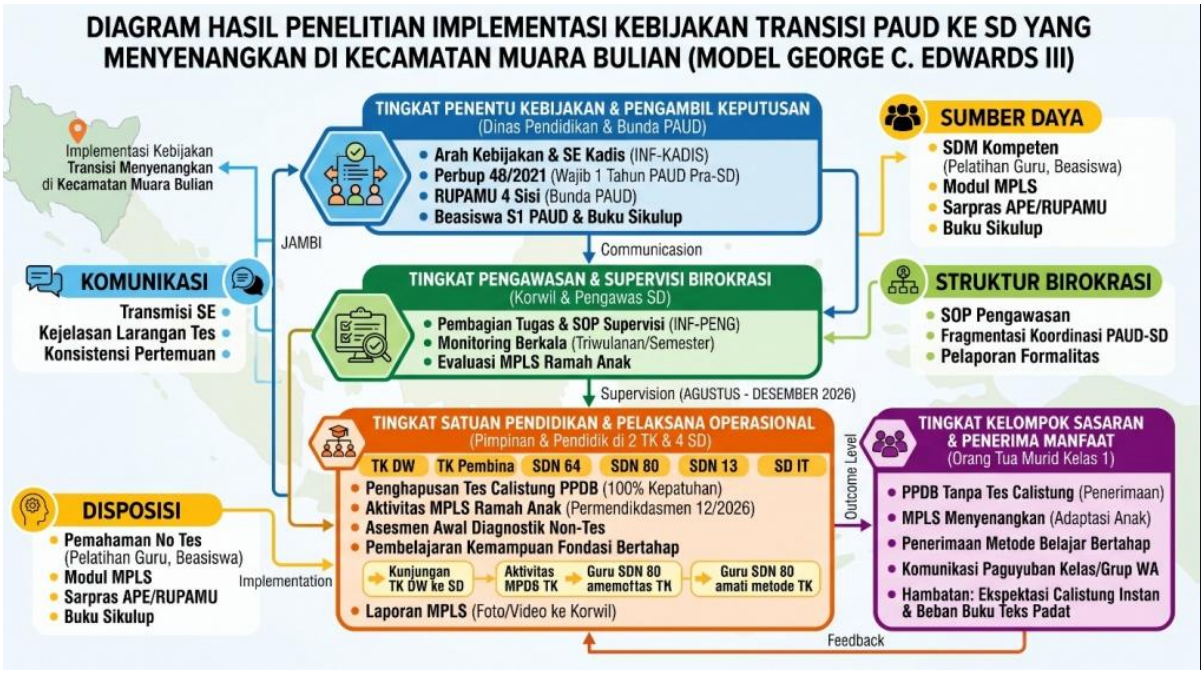
METHODS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kecamatan Muara Bulian melalui model implementasi kebijakan publik George C. Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan rekomendasi strategis penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal tertanam (embedded single-case study). Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang berlangsung secara siklikal melalui tahapan: 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif moderat, dan studi dokumentasi yang melibatkan informan dari tingkat penentu kebijakan (Dinas Pendidikan, Bunda PAUD), pengawas/supervisi (Korwil, Pengawas SD), satuan pendidikan pelaksana (2 TK dan 4 SD), serta kelompok sasaran orang tua murid.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Data lapangan dianalisis menggunakan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.



Gambar 1.
Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kecematan Muara Bulian (Model George C. Edwards III)

Komunikasi

Transmisi. Informasi kebijakan mengalir melalui dua jalur. Jalur struktural berupa Surat Edaran dan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan, yang diterima seragam oleh kepala sekolah (INF-KS-SD80). Jalur sosiokultural digerakkan Bunda PAUD Kabupaten melalui sosialisasi Perbup Nomor 48 Tahun 2021 di 14 kecamatan bersama PKK dan Posyandu. Pada tingkat satuan, sekolah menjelaskan rangkaian kegiatan transisi kepada orang tua saat pendaftaran (INF-KS-SD64). Kendala yang ditemukan adalah keterlambatan informasi. Kepala Dinas mengakui bahwa informasi kadang diterima terlambat (INF-KADIS).

Kejelasan. Larangan tes calistung pada PPDB dipahami secara jelas oleh kepala sekolah dan guru pada satuan pendidikan sampel. MPLS dilaksanakan selama enam hari kerja, selaras dengan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026. Hari-hari awal difokuskan pada orientasi lingkungan fisik dan adaptasi emosional, kemudian pemetaan awal kemampuan fondasi.

Konsistensi. Konsistensi vertikal terjaga melalui rapat koordinasi tatap muka Dinas Pendidikan. Inkonsistensi muncul pada ranah masyarakat: orang tua masih berekspektasi bahwa anak kelas I harus segera mampu membaca dan berhitung. Kepala SD IT menyebut ekspektasi ini sebagai kendala terbesar (INF-KS-SDIT), dan guru SDN 80/I menilai hambatan tersebut berasal dari orang tua yang menginginkan anaknya cepat menguasai calistung (INF-GUR-SD80).

Sumber Daya

Sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyediakan beasiswa S1 PAUD dan pelatihan "Pembelajaran Berbasis Bermain" serta "Transisi PAUD-SD", dengan target seluruh guru PAUD berkualifikasi minimal D4/S1 PAUD (INF-BUNPAUD). Pada jenjang SD, seluruh guru kelas I telah mengikuti sosialisasi (INF-KS-SD13). Pada jenjang TK, masih ada guru yang terbiasa dengan lembar kerja anak dan calistung sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan; kapasitas dikuatkan melalui KKG dan pendampingan koordinator wilayah (INF-KS-TKDW; INF-KS-TKPB).

Sarana dan materi. Dukungan sarana mencakup pemenuhan sarpras 21 PAUD Negeri baru, bantuan meja-kursi, seragam, dan alat permainan edukatif (INF-KABID; INF-BUNPAUD). Bunda PAUD juga menerbitkan buku cerita lokal "Sikulup Gemar Belajar" yang memuat tujuh kebiasaan anak hebat dan nilai lokal Batanghari. Menurut informan, buku ini membuat anak lebih bersemangat, memberi guru bahan dongeng, dan memungkinkan orang tua mendongeng di rumah.

Ketidaksesuaian materi ajar. Buku paket kelas I SD dinilai terlalu padat narasi bacaan, sehingga tidak sejalan dengan pendekatan transisi yang melarang pemaksaan membaca cepat. Orang tua murid SD IT menyatakan guru mengajarkan anak secara bertahap, tetapi buku kelas awal seakan memaksa anak bisa membaca (INF-OT-SDIT).

Disposisi Pelaksana

Kepatuhan. Seluruh pimpinan dan guru SD sampel mematuhi peniadaan tes calistung. Tes tersebut digantikan asesmen diagnostik awal non-tes di SDN 64/I, SDN 13/I, dan SDN 80/I, sedangkan SD IT melakukan pemetaan kesiapan awal yang tidak menjadi syarat kelulusan masuk. Orang tua murid SDN 64/I mengonfirmasi bahwa anaknya tidak diminta mengikuti tes calistung (INF-OT-SD64).

Praktik pengajaran adaptif. Guru kelas I menerapkan asesmen awal yang ramah anak, misalnya meminta anak menyebutkan nama anggota keluarga, dan anak antusias menunjukkan hasil kerjanya (INF-GUR-SD64). Guru SDN 80/I berkunjung ke TK mitra untuk menyamakan persepsi agar anak tidak mengalami perubahan yang terlalu tajam

(INF-GUR-SD80). Orang tua melaporkan anak yang semula malu atau menangis menjadi berani berbelanja di kantin dan tampil di depan kelas (INF-OT-SD80), serta tidak merasakan tekanan akademik (INF-OT-SD13). Guru TK turut mendampingi anak mengenal lingkungan SD.

Struktur Birokrasi

SOP dan pembagian tugas. Kepala Dinas membagi tugas kepada seluruh pengawas setiap tahun, dan koordinator pengawas bersama tim menyusun SOP tertulis (INF-PENG).

Koordinasi lintas jenjang. Pelaksanaannya masih bervariasi. TK Dharma Wanita dan TK Pembina mengajak anak kelompok B berkunjung ke SD terdekat setahun sekali, menyamakan persepsi dengan kepala SD bahwa tidak ada tes calistung, dan mengirim catatan perkembangan anak ke SD. Pada jenjang SD, hanya SDN 64/I yang menyelenggarakan program kunjungan secara terbuka, sedangkan SDN 80/I, SDN 13/I, dan SD IT belum melakukannya secara rutin. Kepala Dinas mengakui kurangnya koordinasi antarinstansi terkait (INF-KADIS), dan kepala TK mengusulkan MoU resmi PAUD-SD yang dilegitimasi dinas.

Monitoring dan pelaporan. Supervisi dilakukan melalui monitoring triwulanan dinas dan program RUPAMU 4 Sisi oleh Bunda PAUD. Pelaporan MPLS ke koordinator wilayah masih berbentuk dokumentasi foto dan video (INF-KS-SD13) dan belum memuat rekapitulasi profil asesmen diagnostik perkembangan peserta didik.

Discussion

Temuan penelitian sejalan dengan proposisi Edwards III (1980) bahwa keempat variabel implementasi saling memengaruhi, sehingga keberhasilan satu variabel tidak menjamin hasil keseluruhan.

Pertama, komunikasi yang jelas dari Dinas Pendidikan melalui surat edaran dan bimbingan teknis, dengan payung hukum Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026, membentuk kepatuhan satuan pendidikan sampel dalam meniadakan tes calistung. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa komunikasi struktural yang jelas dapat membentuk disposisi pelaksana. Namun, komunikasi kepada pihak eksternal belum seefektif itu: ekspektasi orang tua terhadap kemampuan calistung yang instan masih menjadi sumber inkonsistensi persepsi. Pelaksanaan MPLS enam hari kerja juga menunjukkan bahwa satuan pendidikan menerjemahkan regulasi menjadi masa orientasi yang ramah anak, terarah, dan proporsional.

Kedua, sumber daya menguatkan kapasitas pelaksana, terutama melalui beasiswa S1 PAUD dan buku cerita lokal. Namun, buku paket kelas I yang padat bacaan tidak sejalan dengan prinsip belajar bertahap, sehingga sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan. Hal ini mengonfirmasi bahwa kecukupan sumber daya perlu dinilai dari kesesuaiannya dengan substansi kebijakan, bukan hanya ketersediaannya.

Ketiga, struktur birokrasi pada aspek supervisi sudah terbangun, yaitu melalui SOP pengawas, monitoring triwulanan, dan program RUPAMU 4 Sisi. Namun, koordinasi lintas jenjang PAUD-SD belum terlembagakan, dan pelaporan MPLS masih bersifat administratif-visual. Dengan demikian, komitmen pelaksana pada tingkat sekolah belum diimbangi mekanisme koordinasi dan pelaporan yang menangkap perkembangan anak.

Perbandingan dengan Kajian Terdahulu

Temuan ini memperkuat gagasan Apostolou (2022) bahwa transisi perlu menjadi perancah (scaffolding) bagi kesinambungan pengalaman belajar. Pada satuan pendidikan

sampel, pembelajaran kelas I dimulai secara bertahap setelah tes calistung ditiadakan, dan anak menunjukkan peningkatan kemandirian, misalnya berani berbelanja di kantin.

Pentingnya kemitraan antara keluarga, PAUD, dan SD sebagaimana ditekankan Dockett & Perry (2021) juga terlihat dalam temuan ini, tetapi kemitraan formal PAUD-SD masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan memerlukan pelembagaan melalui struktur birokrasi antarsatuan pendidikan.

Kajian tentang MPLS ramah anak (Khuluqo & Nuraini, 2024; Hanifah, 2024) melaporkan bahwa masa orientasi yang ramah anak menurunkan kecemasan peserta didik baru. Temuan di Muara Bulian searah dengan hal tersebut, dengan catatan bahwa penelitian ini belum mengukur tingkat kecemasan anak secara langsung. Temuan mengenai kunjungan guru SD ke TK dan pengiriman catatan perkembangan anak yang baru berjalan sebagian relevan dengan Hangastuti et al. (2024) tentang kolaborasi pendidik PAUD-SD, dan menggarisbawahi perlunya mandat kebijakan daerah agar kolaborasi merata di seluruh gugus. Kontribusi penelitian ini adalah menghubungkan temuan-temuan tersebut dalam satu analisis implementasi pada tingkat kecamatan melalui empat variabel Edwards III.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung meliputi: (1) regulasi daerah, yaitu Perbup Batanghari Nomor 48 Tahun 2021; (2) kepemimpinan penggerak sosial oleh Bunda PAUD melalui sosialisasi, buku cerita lokal, dan pemantauan; (3) kepatuhan substantif satuan pendidikan sampel terhadap peniadaan tes calistung; (4) dukungan sumber daya daerah berupa beasiswa S1 PAUD, tambahan 21 PAUD Negeri, dan sarana permainan edukatif; serta (5) praktik pengajaran adaptif oleh guru kelas awal.

Faktor penghambat meliputi: (1) ekspektasi calistung dari orang tua; (2) koordinasi lintas jenjang yang belum terlembagakan; (3) buku teks kelas I yang padat bacaan; dan (4) pelaporan MPLS yang didominasi foto dan video tanpa data asesmen diagnostik.

CONCLUSION

Implementasi Kebijakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kecamatan Muara Bulian telah berjalan dengan fondasi yang baik, tetapi belum sepenuhnya merata dan terlembagakan. Pada variabel komunikasi, kebijakan ditransmisikan melalui jalur struktural dan sosiokultural dengan pesan yang jelas, meskipun keterlambatan informasi dan ekspektasi calistung orang tua masih menjadi kendala. Pada variabel sumber daya, dukungan beasiswa, pelatihan, sarana, dan buku cerita lokal telah tersedia, namun buku paket kelas I yang padat bacaan belum sejalan dengan prinsip belajar bertahap.

Pada variabel disposisi, satuan pendidikan sampel menunjukkan kepatuhan terhadap peniadaan tes calistung dan menerapkan pembelajaran adaptif di kelas awal. Pada variabel struktur birokrasi, SOP pengawasan dan monitoring berkala sudah ada, tetapi koordinasi lintas jenjang PAUD-SD belum terlembagakan dan pelaporan MPLS masih bersifat administratif-visual. Keempat variabel saling berkaitan: kejelasan komunikasi membentuk kepatuhan, sedangkan kesesuaian sumber daya dan kelembagaan koordinasi menentukan apakah kepatuhan itu berlanjut menjadi praktik yang konsisten.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan perlu diarahkan pada penyusunan petunjuk teknis MPLS yang terintegrasi dengan asesmen diagnostik, pembentukan forum dan MoU PAUD-SD, edukasi orang tua tentang kemampuan fondasi, penyelarasan bahan ajar kelas I, serta bimbingan teknis terpadu bagi guru PAUD dan SD. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kaitan kualitas implementasi dengan luaran anak pada cakupan wilayah yang lebih luas.

REFERENCES

Apostolou, Z. T. (2022). Continuities, discontinuities and transition in early childhood literacy education at digital time. *Preschool Education: Global Trends*, *2*, 64-93.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dockett, S., Perry, B., Dunlop, A. W., Einarsdottir, J., Garpelin, A., Graue, B., ... & Turunen, T. (2014). *Continuity of learning: A resource to support effective transition to school and school age care*. Department of Education.

Dockett, S., & Perry, B. (2021). Invisible transitions: Transitions to school following different paths. *Australasian Journal of Early Childhood*, *46*(3), 224-235.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Hangastuti, S., Mulyana, N., & Rahmawati, A. (2024). Kolaborasi pendidik PAUD dan SD dalam memperkuat kesinambungan pedagogis pada masa transisi. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1), 45–58.

Hanifah, N. (2024). Optimalisasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ramah anak dalam mendukung adaptasi peserta didik kelas awal sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 6(2), 112–124.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penguatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah Anak dan Larangan Tes Membaca, Menulis, dan Berhitung pada Penerimaan Peserta Didik Baru*. Kemendikdasmen RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan: Membangun kemampuan fondasi anak secara bertahap*. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek.

Khuluqo, I. E., & Nuraini, S. (2024). Pembelajaran menyenangkan sebagai strategi adaptasi dan reduksi kecemasan anak pada fase transisi PAUD ke SD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 890–902.

Li, M. (2023). Sustainable and equitable early childhood education policies: Lessons from decentralized governance. *Early Childhood Education Journal*, 51(4), 621–633.

Mardiani, R., Wibowo, A., & Susilowati, E. (2024). Pengaruh program transisi terstruktur terhadap penyesuaian sosial-emosional dan kesiapan akademik siswa sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 77–91.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mlimahadala, R. J., & Osaki, K. M. (2023). The impact of early childhood service quality on children's readiness for primary education. *International Journal of Educational Development*, 98, Article 102741.

OECD. (2017). *Starting strong V: Transitions from early childhood education and care to primary education*. OECD Publishing.

Pemerintah Kabupaten Batanghari. (2021). *Peraturan Bupati Batanghari Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Madya, S. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.